



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

NOTA-DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
 : melalui Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Dari : Plh. Direktur Produk Hukum Daerah
Nomor : 255/PHD/TH/VI/1/2024
Tanggal : 19 Januari 2024
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/764 tanggal 18 Januari 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan APBG TA 2024, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register CTPKWW tanggal 18 Januari 2024.
2. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
3. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Selatan untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024.
4. Setelah dilakukan penelaahan/pengkajian dari berbagai aspek, permohonan Pj. Bupati Aceh Selatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga dapat dilakukan persetujuan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Selatan dimaksud.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, telah disiapkan net konsep surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri untuk mohon perkenan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon arahan lebih lanjut.

Plh. Direktur Produk Hukum Daerah

Sukaca, SH, M.Si, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650204 199303 1 001

KETUATIM KERJA VI	
KASUBBAG TU	
JFT/JFU	